

**EVALUASI PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI SEBAGAI
UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

Farsya Salsabila Putri

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ssabilafarsya@gmail.com

Indah Murti

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
indah@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Warung Rakyat Direnovasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program tersebut berjalan efektif, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif, karena dinilai mampu memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan program di lapangan, termasuk memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Metode ini juga membantu peneliti melihat secara langsung dampak yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penerima program, pemilik warung, serta pihak-pihak yang terlibat lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif untuk mengamati langsung aktivitas usaha warung serta interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis usaha mikro.

Kata Kunci: *Evaluasi program, UMKM, warung rakyat, pemberdayaan ekonomi, Sidoarjo.*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Warung Rakyat Direnovasi program as one of the efforts to empower the family economy in Sukodono sub-district, Sidoarjo district. The evaluation was conducted to assess the extent to which the program has been effective, identify factors that influence its success, and formulate recommendations for sustainable improvement. The approach used was qualitative with a descriptive design, because it was considered capable of providing an in-depth description of the program implementation in the field, including understanding the social and cultural conditions of the local community. This method also helps researchers to directly see the impact felt by beneficiary families. The data in this study was collected through in-depth interviews with program beneficiaries, stall owners, and other involved parties. In addition, researchers also conducted participatory observations to directly observe the activities of the stall business and the social interactions that occur in the surrounding environment. The results of this study are expected to provide useful input for local governments, non-governmental institutions, and other parties involved in the development of micro-enterprise-based family economic empowerment programs.

Keywords: *Program evaluation, MSMEs, people's stalls, economic empowerment, Sidoarjo.*

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan agenda strategis dalam pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui penguatan kapasitas ekonomi lokal (Putri & Nugrahini, n.d.). Dalam pendekatan ini, masyarakat terutama unit keluarga diposisikan sebagai pelaku sentral dalam kegiatan ekonomi. Hal ini didukung oleh penyediaan akses terhadap permodalan, program pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui strategi semacam ini, diharapkan dapat terbangun struktur ekonomi yang lebih merata, berkeadilan, serta tahan terhadap dinamika global dan berbagai krisis yang terjadi di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam regulasi tersebut, UMKM diakui sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemberdayaan yang bersifat langsung dan terarah menjadi kunci untuk memastikan UMKM tetap tumbuh dan bertahan, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan pasar, serta berperan penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. UMKM tidak hanya menopang pertumbuhan

ekonomi dari sisi produksi dan distribusi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor ini menjadi sangat penting, bukan hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari sisi sosial, karena UMKM turut mendukung terciptanya kemandirian keluarga dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat sasaran, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu persoalan mendasar dalam upaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah terbatasnya kapasitas usaha yang dimiliki, baik dari sisi fasilitas fisik, kemampuan manajerial, maupun daya saing terhadap pasar. Banyak pelaku usaha mikro, khususnya pemilik warung rakyat, masih menjalankan aktivitas usahanya dengan sarana yang sangat sederhana. Banyak dari mereka berjualan di tempat yang sempit, pencahayaan minim, sirkulasi udara kurang baik, dan tampilan warung yang kurang menarik. Selain itu, akses terhadap modal usaha pun masih menjadi kendala utama—banyak pelaku UMKM kesulitan menambah stok atau memperbaiki tempat usaha karena keterbatasan dana. Tidak hanya itu, kemampuan mengelola usaha seperti mencatat keuangan, mengatur stok barang, dan melakukan promosi secara efektif juga masih rendah. Ketiga faktor ini menjadi penghambat utama bagi usaha mikro untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Tekanan dari persaingan dengan ritel modern serta perkembangan teknologi digital membuat posisi warung rakyat semakin terjepit. Tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk bantuan teknis dan non-teknis, usaha kecil rentan stagnan bahkan terpaksa tutup. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan UMKM harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan agar pelaku usaha memiliki kapasitas yang cukup untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan pendapat (Januardin Sp, 2021) yang menegaskan bahwa penguatan UMKM sangat strategis dalam menopang ekonomi nasional karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kecil dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan krisis.

Sebagai bentuk respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Program Warung Rakyat Direnovasi sejak tahun 2022. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas fisik warung rakyat agar lebih layak dan menarik secara visual, sekaligus memberikan pelatihan usaha dan pendampingan teknis guna memperkuat kapasitas manajerial pelaku usaha. Tujuannya adalah menciptakan transformasi ekonomi mikro yang berkelanjutan, di mana warung tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang dan bersaing secara sehat. Renovasi fisik dipadukan dengan intervensi non-fisik sebagai upaya menciptakan ekosistem usaha yang lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga.

Namun, dalam proses pelaksanaannya, muncul dinamika yang perlu dievaluasi lebih lanjut, seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan pelaksanaan di berbagai wilayah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Program Warung Rakyat Direnovasi berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dengan menelaah dampaknya dari sisi individu, organisasi, sosial, hingga sistem sosial secara menyeluruh.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas program serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran ke depannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan dan dampak Program Warung Rakyat Direnovasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan kondisi objek penelitian secara aktual berdasarkan data atau fakta yang ditemukan di lapangan. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses analisis dan interpretasi untuk memahami fenomena yang diteliti. Pendekatan ini umumnya diterapkan melalui survei, studi korelasional, maupun studi pengembangan (Anggreni, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara kontekstual dan memahami perspektif subjek secara mendalam.

Lokasi penelitian ini difokuskan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta Kecamatan Sukodono sebagai lokasi utama kajian. Pemilihan Kecamatan Sukodono didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi yang cukup besar. Selain itu, Kecamatan Sukodono dianggap representatif dalam mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara umum, termasuk dalam hal kemajemukan karakteristik pelaku usaha mikro, khususnya warung rakyat. Keragaman jenis usaha, tingkat akses terhadap fasilitas pendukung, serta interaksi sosial ekonomi antar pelaku usaha menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi penelitian. Melalui fokus di wilayah ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

1. Observasi langsung terhadap kondisi fisik warung, aktivitas usaha, dan interaksi sosial pemilik warung dengan pelanggan maupun lingkungan sekitar.
 2. Wawancara mendalam, yang melibatkan pemilik warung penerima manfaat, masyarakat, serta pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
 3. Dokumentasi, berupa arsip pelaksanaan program dan laporan teknis.
- Fokus evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada teori evaluasi dampak Samodra Wibawa, yang menganalisis keberhasilan program berdasarkan empat dimensi utama, yaitu:
- a. Dampak individual, meliputi perubahan ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan pada penerima manfaat.
 - b. Dampak organisasional, mencakup efek program terhadap penguatan struktur atau kelompok usaha.
 - c. Dampak masyarakat, menilai kontribusi program terhadap kohesi sosial dan dinamika ekonomi lokal.

- d. Dampak sistem sosial, meliputi sejauh mana program memengaruhi sistem nilai, kebijakan, dan relasi antar lembaga di tingkat lokal.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis interaktif model Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan teori evaluasi dampak kebijakan dari Samodra Wibawa (1994) yang menekankan pentingnya menilai kebijakan publik dari dampaknya terhadap berbagai unit sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini mencakup empat dimensi utama, yaitu dampak terhadap individu, organisasi, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial, yang masing-masing dapat mencerminkan sejauh mana kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Tahalea et al., 2015). Evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan akhir dalam suatu proses kebijakan, meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari proses kebijakan publik (Hikmah et al., 2022). Teori ini relevan karena mampu mengakomodasi dimensi sosial-ekonomi yang kompleks dalam implementasi program pemberdayaan berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada berbagai tingkat.

1. Dampak Individual

Evaluasi terhadap dampak individual dari Program Warung Rakyat Direnovasi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada penerima manfaat, baik dalam aspek mental, lingkungan usaha, pendapatan, maupun kapasitas pribadi. Dampak ini menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kecamatan Sukodono.

a. Dampak Psikis

Program ini memberikan pengaruh positif terhadap kondisi psikologis pemilik warung. Banyak responden menyampaikan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengembangkan usaha setelah menerima bantuan renovasi. Rasa bangga karena warung mereka kini tampak lebih bersih, modern, dan nyaman turut meningkatkan semangat kerja. Beberapa pelaku usaha juga mengaku mengalami peningkatan optimisme dalam menghadapi persaingan usaha. Namun, sebagian kecil penerima manfaat juga sempat merasa cemas dan terbebani pada awalnya karena khawatir tidak mampu menjaga warung pasca-renovasi, baik dari sisi perawatan maupun penyesuaian terhadap sistem manajemen baru yang dikenalkan melalui pelatihan.

b. Dampak Lingkungan

Perubahan fisik warung memberikan dampak langsung terhadap lingkungan usaha mereka. Warung-warung yang sebelumnya tampak

sederhana dan kurang tertata kini menjadi lebih layak dikunjungi. Hal ini berdampak pada peningkatan kenyamanan pelanggan, kebersihan sekitar tempat usaha, serta citra usaha secara keseluruhan. Selain itu, pemilik warung juga menunjukkan perubahan perilaku dalam menjaga kebersihan dan estetika, seperti penyediaan tempat sampah, penataan rak produk yang rapi, dan pencahayaan yang cukup. Ini membuktikan bahwa intervensi fisik turut memengaruhi perilaku dan budaya usaha yang lebih profesional.

c. Dampak Ekonomi

Salah satu dampak yang paling menonjol dari program ini adalah peningkatan pendapatan harian. Renovasi fisik dan peningkatan tampilan warung mendorong peningkatan jumlah pelanggan, khususnya dari kalangan masyarakat sekitar yang sebelumnya enggan berbelanja di warung dengan kondisi kurang layak. Beberapa pemilik warung menyebutkan adanya peningkatan omzet yang signifikan, terutama setelah program diluncurkan. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak merata, karena ada beberapa pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan potensi renovasi secara maksimal akibat keterbatasan strategi pemasaran atau daya beli masyarakat sekitar.

d. Dampak Personal

Program ini juga memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas individu pelaku usaha. Melalui pelatihan manajemen dasar, pengelolaan keuangan, dan strategi pelayanan, pemilik warung memiliki bekal keterampilan yang lebih baik dalam mengelola usahanya. Selain keterampilan teknis, terjadi pula peningkatan dalam kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, pengaturan stok barang, dan strategi promosi. Meskipun belum semua penerima manfaat mengimplementasikan ilmu tersebut secara optimal, program ini telah memantik perubahan perilaku ke arah yang lebih profesional dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

2. Dampak Organisasional

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana utama program Warung Rakyat Direnovasi menunjukkan komitmen tinggi dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha mikro. Hal ini terlihat dari upaya aktif dalam sosialisasi program, pendampingan teknis, serta pelaksanaan renovasi yang terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2022. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala yang mengindikasikan lemahnya koordinasi antar pelaksana teknis di lapangan. Keterlambatan informasi, perbedaan pemahaman antara petugas teknis dan pendamping lapangan, serta ketidaksinkronan antara jadwal survei dan proses renovasi menjadi beberapa contoh hambatan koordinatif yang memengaruhi kelancaran program.

Kurangnya komunikasi yang intensif antar unit pelaksana dan tidak adanya sistem pelaporan terpadu menyebabkan beberapa pelaku usaha merasa kebingungan dalam mengikuti alur program. Misalnya, beberapa pemilik warung

mengaku tidak mendapatkan informasi teknis renovasi secara jelas, sehingga proses adaptasi terhadap renovasi kadang menimbulkan ketidaknyamanan sementara.

Selain itu, pengawasan terhadap kualitas hasil renovasi belum sepenuhnya maksimal. Ada laporan dari beberapa penerima manfaat yang mengeluhkan kualitas material atau pengerjaan renovasi yang tidak sesuai harapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi monitoring belum berjalan optimal, terutama pada level organisasi teknis yang bertugas di lapangan.

Meski demikian, program ini juga mendorong munculnya dinamika positif di lingkungan organisasi pelaksana. Dinas Koperasi mulai membuka ruang kolaborasi dengan komunitas UMKM, LPMK, hingga perangkat desa untuk menjangkau data dan usulan warung yang layak direnovasi. Inisiatif ini menandai adanya langkah maju dalam pelibatan aktor nonpemerintah dalam proses kebijakan publik, walaupun masih bersifat parsial dan perlu penguatan kelembagaan.

Secara keseluruhan, dampak organisasional dari program ini mencerminkan perlunya perbaikan manajemen koordinasi dan penguatan sistem komunikasi lintas pelaksana agar pelaksanaan program dapat lebih efektif, efisien, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

3. Dampak Sosial Masyarakat

Program Warung Rakyat Direnovasi yang dijalankan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Sukodono, telah memberikan dampak sosial yang cukup signifikan terhadap masyarakat sekitar. Tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pemilik warung, program ini juga menciptakan efek domino yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Warung yang telah direnovasi tampak lebih rapi, bersih, dan menarik, sehingga konsumen merasa lebih nyaman untuk berbelanja. Hal ini tidak hanya meningkatkan omset warung, tetapi juga memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi mikro lainnya di sekitar lokasi warung, seperti pedagang kaki lima, ojek online, hingga penyedia jasa kebersihan dan pengiriman barang.

Lebih jauh lagi, program ini mendorong munculnya solidaritas sosial antar pelaku usaha kecil. Banyak pelaku usaha yang saling berbagi informasi, pengalaman, dan bahkan saling membantu dalam pengelolaan stok atau pemasaran. Proses renovasi yang melibatkan masyarakat setempat juga menciptakan semangat gotong royong, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun saat pemanfaatan pasca renovasi. Dalam beberapa kasus, pemilik warung saling membantu memperbaiki bagian-bagian warung yang belum selesai atau memberikan pinjaman kecil antar sesama pelaku usaha.

Tak kalah penting, warung yang direnovasi kini juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial warga. Warga sekitar lebih sering berkumpul di warung untuk berdiskusi, bertukar informasi, atau sekadar bersantai. Warung tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat jual beli, tetapi menjadi ruang publik informal yang memperkuat ikatan sosial antarwarga. Fenomena ini mempertegas peran warung rakyat sebagai simpul sosial yang mempererat koneksi antarindividu dalam komunitas.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek keberlanjutan relasi sosial ini. Beberapa warung yang kurang aktif dalam menjalin

komunikasi dengan warga tidak mengalami dampak sosial yang sekuat warung lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan non-fisik seperti pelatihan komunikasi, manajemen pelanggan, dan pengelolaan komunitas.

Secara keseluruhan, program ini telah memperlihatkan bahwa intervensi kebijakan yang berfokus pada ekonomi mikro dapat memberikan dampak sosial yang luas dan mendalam, khususnya dalam membangun rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepercayaan sosial di tengah masyarakat.

4. Dampak pada Sistem Sosial

Secara sistemik, Program Warung Rakyat Direnovasi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika sosial dan struktur ekonomi di tingkat lokal. Program ini tidak hanya memberikan bantuan fisik berupa renovasi warung, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem sosial yang lebih adaptif dan resilien terhadap tantangan ekonomi, terutama di masa pascapandemi. Salah satu dampak utama yang dapat diamati adalah penguatan struktur ekonomi lokal. Dengan meningkatnya daya tarik warung rakyat yang telah direnovasi, terjadi perputaran ekonomi yang lebih intens di lingkungan sekitar. Aktivitas jual beli menjadi lebih stabil, kebutuhan dasar masyarakat lebih mudah diakses secara lokal, dan peluang kerja informal pun terbuka lebih luas—baik dalam proses renovasi, distribusi barang dagangan, maupun dukungan logistik lainnya. Kondisi ini secara tidak langsung ikut menekan angka pengangguran, terutama di sektor ekonomi mikro dan pekerja harian.

Program ini juga mendorong penguatan sistem sosial berbasis komunitas, di mana pelaku usaha kecil dan masyarakat saling terhubung dalam jaringan ekonomi dan sosial yang saling mendukung. Hal ini menciptakan ekosistem lokal yang lebih inklusif, di mana warung bukan hanya pusat ekonomi tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Namun, keberhasilan sistemik program ini masih menghadapi beberapa tantangan serius, khususnya dalam hal pemerataan dan kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah distribusi bantuan yang belum merata. Masih terdapat warung-warung rakyat yang memenuhi kriteria tetapi belum tersentuh program, baik karena keterbatasan data, proses seleksi yang kurang transparan, maupun kendala administratif. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan sosial dan kecemburuan antarpelaku usaha di lingkungan yang sama.

Tantangan berikutnya adalah lemahnya mekanisme evaluasi dan koreksi kebijakan. Hingga saat ini, belum ada sistem evaluasi terpadu yang mampu menilai dampak program secara komprehensif dan berkelanjutan. Akibatnya, potensi perbaikan atau penyesuaian program berdasarkan dinamika di lapangan seringkali tidak segera ditindaklanjuti. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme adaptasi kebijakan yang semestinya bersifat reflektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem sosial yang mencakup penyempurnaan mekanisme evaluasi, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta keterlibatan komunitas dalam pengawasan program. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis data, program ini memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem sosial yang lebih tangguh dan berdaya saing di tingkat lokal.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peran strategis dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro serta revitalisasi ekonomi lokal pasca pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif secara multidimensi meningkatkan kapasitas ekonomi individu, mendorong dinamika organisasi pelaku kebijakan dan komunitas usaha, serta memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Warung yang telah direnovasi bukan hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang mempererat solidaritas warga. Meskipun begitu, efektivitas program masih dibayangi oleh tantangan seperti distribusi bantuan yang belum merata, koordinasi teknis yang lemah, dan mekanisme evaluasi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik agar program dapat berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara adil.

Saran

Merujuk pada beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi, maka sejumlah rekomendasi berikut disampaikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program :

1. Perlu Analisis Lokasi yang Lebih Komprehensif
Diperlukan penerapan analisis kelayakan lokasi secara sistematis sebelum pemilihan warung yang akan direnovasi. Penilaian sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga memperhitungkan potensi aksesibilitas, arus lalu lintas konsumen, dan peran sosial warung dalam komunitas. Pemanfaatan pendekatan spasial berbasis data untuk membantu memastikan bahwa intervensi dilakukan di lokasi-lokasi yang benar-benar strategis secara ekonomi maupun sosial.
2. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi yang Terstruktur
Monitoring dan evaluasi dari pemerintah sangat penting untuk memastikan efektivitas program secara menyeluruh. Evaluasi tidak boleh terbatas pada kondisi fisik warung, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis penerima manfaat. Penilaian ekonomi, seperti peningkatan omzet dan efisiensi keuangan, menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program secara berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan kedua aspek tersebut, program ini tidak hanya akan berdampak secara fisik, tetapi juga mampu menumbuhkan perubahan perilaku dan orientasi usaha pelaku warung rakyat secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN*.
- Hikmah, Y. M. N., Kostini, N., & Arifianti, R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Biaya Operasional Kesehatan Di Puskesmas Santosa Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 215. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34742>
- Januardin Sp, M. (2021). *Pengembangan Umkm* (Issue October). <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110/82>

- Putri, C. A., & Nugrahini, D. S. (n.d.). *Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Penyuluhan Inovasi Produk Dan Pemasaran Online Kerupuk Lontong Di Dusun Blandongan Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.*
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–12.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)